



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT
NOMOR: W.33-29.OT.03.03 Tahun 2023**

**TENTANG
TIM VERIFIKATOR
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun 2022, dipandang perlu membentuk Tim Verifikator Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Verifikator Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT TAHUN 2023;
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikator Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:
1. Melakukan pendampingan, penilaian/evaluasi dan penguatan terhadap pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan oleh satuan kerja;
 2. Melakukan verifikasi data dukung Satuan Kerja dilingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat;
 3. Menyampaikan rekomendasi kepada Unit Pembina terhadap kelayakan satuan kerja untuk mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan melaporkannya kepada Unit Pembina.
- KETIGA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Nomor W.33 -13.OT.03.03 Tahun 2023 perihal Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Tembusan:
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 15 Juni 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PARLINDUNGAN
NIP 197007011992031002

TIM VERIFIKATOR
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI BARAT

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali
Ketua Tim : Kepala Divisi Administrasi
Wakil Ketua Tim: Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi
Sekretaris : Kepala Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
Anggota :
 - a. Samsir Usman (Pokja Manajemen Perubahan)
 - b. Faturrahman (Pokja Penataan Tatalaksana)
 - c. Mardina (Pokja Penataan Manajemen SDM)
 - d. Jaka JN Firdiansyah (Pokja Penguatan Akuntabilitas)
 - e. Satriyana (Pokja Penguatan Pengawasan)
 - f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - 1) Zeni Rukmansah (Pelayanan Publik)
 - 2) Sudiarto Yunus (Pengaduan dan Pemanfaatan TI)
 - 3) A. Febry Pajriani (Survei IKM/IPK)

2. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar
Ketua Tim : Kepala Divisi Administrasi
Wakil Ketua Tim: Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Sekretaris : Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian
Anggota :
 - a. Al Firqa Annajiah (Pokja Manajemen Perubahan)
 - b. Ramlah (Pokja Penataan Tatalaksana)
 - c. I Gusti Ayu Cynthia Candra Dewi (Pokja Penataan Manajemen SDM)
 - d. Sahfrida Tambunan (Pokja Penguatan Akuntabilitas)
 - e. Ida Mashita (Pokja Penguatan Pengawasan)
 - f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - 1) Bachri Sahputra (Pelayanan Publik)
 - 2) Apriandhy Fauzi Kahar (Pengaduan dan Pemanfaatan TI)
 - 3) Sitti Ira (Survei IKM/IPK)

3. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju
Ketua Tim : Kepala Divisi Keimigrasian
Wakil Ketua Tim: Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
Sekretaris : Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian
Anggota :
 - a. Wilfirsty Mayesty (Pokja Manajemen Perubahan)
 - b. Luberty Toding (Pokja Penataan Tatalaksana)
 - c. Ermita (Pokja Penataan Manajemen SDM)
 - d. Irma Yanti (Pokja Penguatan Akuntabilitas)
 - e. Rafli Aditya Priatna (Pokja Penguatan Pengawasan)
 - f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - 1) Sitti Fatimah (Pelayanan Publik)
 - 2) Andi Kadir (Pengaduan dan Pemanfaatan TI)
 - 3) Ahmadi (Survei IKM/IPK)

4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju
Ketua Tim : Kepala Divisi Pemasyarakatan
Wakil Ketua Tim: Kepala Bagian Umum
Sekretaris : Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga
Anggota :
 - a. Imam Wahyudi (Pokja Manajemen Perubahan)

- b. Iswahyudi Kusuma Negara Munir (Pokja Penataan Tatalaksana)
 - c. Romilda Daniel (Pokja Penataan Manajemen SDM)
 - d. Panji Soegihatmojo (Pokja Penguatan Akuntabilitas)
 - e. Rizal Harmawan Samauna (Pokja Penguatan Pengawasan)
 - f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - 1) Prasetya Dwi Pratama (Pelayanan Publik)
 - 2) Nurhadi (Pengaduan dan Pemanfaatan TI)
 - 3) A. Disa Permata Sari S. (Survei IKM/IPK)
5. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene
- Ketua Tim : Kepala Divisi Administrasi
- Wakil Ketua Tim: Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
- Sekretaris : Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi
- Anggota :
- a. Rosa Dwi Fanani (Pokja Manajemen Perubahan)
 - b. Citrawati Tiring (Pokja Penataan Tatalaksana)
 - c. Friederik Christian Sembiring (Pokja Penataan Manajemen SDM)
 - d. M. Akhsan (Pokja Penguatan Akuntabilitas)
 - e. Ismail (Pokja Penguatan Pengawasan)
 - f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - 1) Feri Yulianto (Pelayanan Publik)
 - 2) Muhammad Aldi Wiratama (Pengaduan dan Pemanfaatan TI)
 - 3) Tri Rezki Dermawan (Survei IKM/IPK)
6. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju
- Ketua Tim : Kepala Divisi Administrasi
- Wakil Ketua Tim: Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
- Sekretaris : Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
- Anggota :
- a. Al Firqa Annajiah (Pokja Manajemen Perubahan)
 - b. Luberty Toding (Pokja Penataan Tatalaksana)
 - c. Muh. Muaffiq Fahrur Nur (Pokja Penataan Manajemen SDM)
 - d. Sahfrida Tambunan (Pokja Penguatan Akuntabilitas)
 - e. Ida Mashita (Pokja Penguatan Pengawasan)
 - f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - 1) Fahriani Ms. (Pelayanan Publik)
 - 2) Muhammad Ramadhan Abdullah (Pengaduan dan Pemanfaatan TI)
 - 3) Mitra Bangsawan (Survei IKM/IPK)
7. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu
- Ketua Tim : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
- Wakil Ketua Tim: Kepala Bidang HAM
- Sekretaris : Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- Anggota :
- a. Wa Ode Maya Harmi (Pokja Manajemen Perubahan)
 - b. Ramlah (Pokja Penataan Tatalaksana)
 - c. Astuti Toding (Pokja Penataan Manajemen SDM)
 - d. M. Akhsan (Pokja Penguatan Akuntabilitas)
 - e. Reynelda Simamora (Pokja Penguatan Pengawasan)
 - f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - 1) Bachri Sahputra (Pelayanan Publik)
 - 2) Musniar Nasruddin (Pengaduan dan Pemanfaatan TI)
 - 3) Muhammad Irsyadi Ramadhany (Survei IKM/IPK)
8. Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali
- Ketua Tim : Kepala Divisi Pemasyarakatan

Wakil Ketua Tim: Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi

Sekretaris : Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak

Anggota :

- a. Imam Wahyudi (Pokja Manajemen Perubahan)
- b. Faturrahman (Pokja Penataan Tatalaksana)
- c. I Gusti Ayu Cynthia Candra Dewi (Pokja Penataan Manajemen SDM)
- d. Jaka JN Firdiansyah (Pokja Penguatan Akuntabilitas)
- e. Rina Ervina (Pokja Penguatan Pengawasan)
- f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - 1) Feri Yulianto (Pelayanan Publik)
 - 2) Sudiarto Yunus (Pengaduan dan Pemanfaatan TI)
 - 3) A. Febry Pajriani (Survei IKM/IPK)

9. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju

Ketua Tim : Kepala Divisi Pemasyarakatan

Wakil Ketua Tim: Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi,
Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan

Sekretaris : Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan
Rehabilitasi

Anggota :

- a. Wilfirsty Mayesty (Pokja Manajemen Perubahan)
- b. Munawir B. (Pokja Penataan Tatalaksana)
- c. Romilda Daniel (Pokja Penataan Manajemen SDM)
- d. Irma Yanti (Pokja Penguatan Akuntabilitas)
- e. Rina Ervina (Pokja Penguatan Pengawasan)
- f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - 1) Zeni Rukmansah (Pelayanan Publik)
 - 2) Apriandhy Fauzi Kahar (Pengaduan dan Pemanfaatan TI)
 - 3) Sitti Ira (Survei IKM/IPK)

10. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Mamuju

Ketua Tim : Kepala Divisi Keimigrasian

Wakil Ketua Tim: Kepala Bidang Hukum

Sekretaris : Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Anggota :

- a. Wa Ode Maya Harmi (Pokja Manajemen Perubahan)
- b. Victor Oliver (Pokja Penataan Tatalaksana)
- c. M. Risdar Eka Putra (Pokja Penataan Manajemen SDM)
- d. Rusmini (Pokja Penguatan Akuntabilitas)
- e. Ramli. R (Pokja Penguatan Pengawasan)
- f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - 1) Sitti Fatimah (Pelayanan Publik)
 - 2) Andi Kadir (Pengaduan dan Pemanfaatan TI)
 - 3) Ahmadi (Survei IKM/IPK)

11. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa

Ketua Tim : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Wakil Ketua Tim: Kepala Bidang Pelayanan Hukum

Sekretaris : Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Anggota :

- a. A. Rahma Mulianty Umar (Pokja Manajemen Perubahan)
- b. Achmad Fauzie Azis (Pokja Penataan Tatalaksana)
- c. Friederik Christian Sembiring (Pokja Penataan Manajemen SDM)
- d. Panji Soegihatmojo (Pokja Penguatan Akuntabilitas)
- e. A. Fadhilah Yustisianty Umar (Pokja Penguatan Pengawasan)
- f. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - 1) Prasetya Dwi Pratama (Pelayanan Publik)

- 2) Nurhadi (Pengaduan dan Pemanfaatan TI)
- 3) Tri Rezki Dermawan (Survei IKM/IPK)



Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 15 Juni 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PARLINDUNGAN
NIP 197007011992031002